

## Marak Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

**TANGERANG (IM)** - Informasi dugaan maraknya pungutan liar (pungli) di Pusat Kuliner Pasar Lama Kota Tangerang ramai beredar di media sosial. Ketua Komunitas UMKM Pasar Lama, Suhendi pun menanggapi terkait praktik pungli di pusat kuliner yang berada di Jalan Kisamaun Kota Tangerang ini.

Suhendi menyebut, praktik pungli yang diistilahkan sebagai salaran di pasar lama benar adanya.

"Iya ada seperti salarsalar mah. Cuma tergantung lapaknya," ujarnya, Jumat (3/9). Menurutnya, praktik salaran sudah biasa di setiap pasar termasuk di Pasar Lama Kota Tangerang.

"Ya yang namanya biasa pasar ya salar. Jadi mungkin sudah tradisi di mana-mana," katanya. Meskipun benar adanya, Suhendi menuturkan, tidak mengetahui secara pasti pedagang yang mengeluh keberatan salaran. Sebab pedagang yang berjualan di pusat kuliner Pasar Lama sangat banyak.

"Kalau terkait itu segala macam saya tidak ada urusan, bukan ranah saya, saya juga kan pedagang," ungkapnya.

Setahu Suhendi, praktik salaran pedagang di pusat kuliner Pasar Lama berbeda-beda pada setiap lapak pedagang. Ada yang memberikan salaran per hari, per minggu, atau per bulan dengan jumlah besaran bervariasi.

Suhendi sendiri memberikan uang ke pihak pengelola parkir setiap bulan dengan istilah sewa lapak dagangan.

"Kalau saya kan dagang bayar. Saya bayar bulanan ke pengelola parkir, istilahnya saya beli lahan parkir, misal motor sehari lima itu. Jadi, kalau lima motor kan Rp10 ribu, berarti saya bayar Rp300 ribu sebulan," jelasnya.

Suhendi menganggap pembayaran sewa lapak tersebut wajar. Yang terpenting bagi pedagang adalah bisa berjualan secara nyaman dan aman.

Pihak Komunitas UMKM Pasar Lama yang dipimpinnya pun siap bekerja sama dengan pengelola termasuk pemerintah demi menciptakan suasana dagang yang kondusif.

"Bagi saya semua unsur damailah karena pedagang ingin kedamaian," pungkaskannya. ● pp



**WAKSINASI UNTUK PELAJAR DAN PENGAJAR DI BANTEN**

Guru menenangkan pelajar saat disuntik vaksin Covid-19 di SMK Negeri 1 Serang, Banten, Jumat (3/9). Vaksinasi yang digelar Pemda setempat bekerja sama dengan Biddokes Polda Banten itu bertujuan untuk mempercepat pencapaian kekebalan komunal (Herd Immunity) sekaligus persiapan penyelenggaraan belajar tatap muka.

## 389 Sekolah di Tangerang Siap Gelar PTM dengan Prokes Ketat

Kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ketika awal 2021, kemudian tahun ajaran baru, jadi sejatinya September ini kita harus siap, kata Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang, Mohamad Bayuni.

**TANGERANG (IM)** - Sebanyak 389 sekolah tingkat menengah atas, yakni SMA, SMK dan SKH yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten siap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten

Tangerang, Mohamad Bayuni di Tangerang, kemarin mengatakan dari seluruh sekolah yang akan menggelar PTM itu sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari terutama dalam menerapkan teknis protokol kesehatan.

"Kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ketika awal 2021, kemudian tahun ajaran baru, jadi sejatinya September ini kita harus siap," katanya.

Adapun dari jumlah 389 sekolah tingkat menengah atas tersebut terbagi menjadi tiga, diantaranya SMA sebanyak 170, SMK sebanyak 200 dan SKH sebanyak 19 sekolah yang tersebar di seluruh wilayahnya.

Ia menuturkan, dengan kesiapan seluruh sekolah tersebut, pihaknya dalam hal ini akan kembali melakukan pengecekan dan sosialisasi terkait pemenuhan sarana prasarana penunjang persyaratan pelaksanaan PTM di tengah pandemi.

"Saat ini yang telah mengadakan langsung PTM baru 10 persen dan itu hanya sekedar sosialisasi, edukasi dan adaptasi pelajar," ujarnya.

Lebih lanjut, Bayuni menambahkan, sejumlah peraturan penunjang lain akan diterapkan kepada siswa sekolah pada pelaksanaan PTM nanti, seperti siswa diwajibkan harus memiliki izin dari orang tua masing-masing.

Kemudian, siswa juga harus membawa bekal dan alat tulis sendiri, karena nanti tidak ada jam istirahat.

"Karena jamnya terbatas siswa tidak ada istirahat. Dan jam pembelajarannya juga akan diatur," tambahnya.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan PTM, KCD Kabupaten Tangerang kini tengah mengencakan program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh pelajar yang ada di wilayahnya.

"Kita bersama Pemerintah Provinsi Banten, dari kemarin sudah melakukan vaksinasi massal untuk pelajar guna menunjang pelaksanaan PTM nanti," kata dia. ● tom

## Pembangunan SMKN 7 Tangsel Mangkrak dan Kekurangan Ruang Kelas

**TANGSEL (IM)** - Suasana SMK Negeri 7 Tangerang Selatan tampak sepi, Jumat (3/9) siang. Tak terdengar suara riuh dari dalam kelas yang menandakan sedang ada kegiatan belajar mengajar. Sejak pandemi Covid-19 melanda pada 2020, aktivitas belajar mengajar memang dihentikan sementara dan belum digelar kembali sampai saat ini.

Di area lobi utama, hanya terlihat sejumlah guru dan tenaga kependidikan yang sibuk dengan tumpukan berkas di atas meja. Aktivitas SMK Negeri 7 Tangerang Selatan tampak berjalan normal, meski terdapat permasalahan korupsi yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sekolah itu. Lembaga antirasuah mengumumkannya bahwa pihaknya mencium dugaan korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan gedung SMK Negeri 7 Tangerang Selatan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Banten 2017 itu tengah diusut. Penyidik KPK sudah melakukan pengecekan di sejumlah lokasi.

Dari situ, KPK menyita barang bukti dokumen, barang elektronik, dan dua unit mobil dari pihak terkait yang sampai

saat ini belum diungkap identitasnya.

Di balik kasus korupsi pengadaan lahan sekolah tersebut, SMK Negeri 7 Tangerang Selatan nyatanya memiliki permasalahan lain dalam hal sarana dan prasarana.

Sekolah yang berdiri sejak 2018 itu kekurangan ruang kelas untuk menampung sekitar 600 siswa, jika pembelajaran tatap muka (PTM) kembali dimulai.

Wakil Kepala SMK Negeri 7 Tangerang Selatan, Wita Maulida mengatakan, belum ada pembangunan lanjutan sejak gedung sekolah berdiri pada 2018 dan mulai dipergunakan setahun setelahnya.

"Kalau mandek atau enggak saya kurang paham juga. Itu ranahnya sarana prasarana. Dari 2018 juga belum ada pembangunan lagi," kata Wita kepada wartawan.

Menurut Wita, SMK Negeri 7 Tangerang Selatan hingga kini baru memiliki tiga ruang kelas.

Sementara jumlah siswa saat ini sekitar 600 orang yang terbagi ke dalam 15 rombongan belajar.

"Kalau ruang kelas di sini ada tiga. Satu angkatan ada lima kelas (rombongan belajar). Per kelas itu 40 siswa. Jadi totalnya 15 kalau satu angkatan

lima kelas. Untungnya masih daring," ungkap Wita.

Dari pantauan di lokasi, pembangunan gedung sekolah yang berada di Jalan Cempaka 3, Rengas, Ciputat Timur itu, tampak belum rampung.

Akses keluar masuk area sekolah hanya berupa jalan bebatuan selebar kurang lebih 1 meter. Tak ada pintu gerbang dan papan nama sekolah seperti pada umumnya.

Di dalam area sekolah, terlihat besi-besi bangunan terlihat di bagian atas gedung ruang kelas yang seharusnya memiliki dua lantai.

Lapangan untuk aktivitas siswa juga masih berupa tanah lapang yang ditumbuhi ilalang dan rumput liar.

Wita berharap, dugaan kasus korupsi yang saat ini menjadi sorotan berbagai pihak, dapat sekaligus mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

"Kalau terkait dengan pengadaan lahan itu juga kami kurang tahu. Karena kan istilahnya kami menempati saja," kata Wita.

"Makanya mudah-mudahan dari masalah yang datang, bisa membantu percepatan pembangunan. Maksudnya dari masalah, jadi ada berkah," pungkaskannya. ● pp

## Komisi X Cek Kesiapan Sekolah Penggerak di Kota Tangerang

**TANGERANG (IM)** - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tangerang terkait persiapan pelaksanaan Sekolah Penggerak yang menjadi program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Alhamdulillah, dari diskusi beberapa hal yang kita lakukan di Pemkot Tangerang melalui Dinas Pendidikan, untuk awal ini cukup baik, tidak ada permasalahan krusial terkait persiapan dan kesiapan sekolah maupun guru penggerak di Kota Tangerang," kata Ketua Rombongan Komisi X DPR RI, Ferdiansyah di Puspemkot Tangerang, Jumat (3/9).

Ferdiansyah mengatakan kunjungan kerja Komisi X DPR RI diikuti 25 anggota dan remangu kepentingan, Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbudristek, Dr. Suhartono serta dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Banten.

Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin menerangkan Kota Tangerang merupakan salah satu dari 111 Kota/Kabupaten yang terpilih menjadi kota penyelenggara Program Sekolah Penggerak pada tahap awal dan sudah diluncurkan pada 16 Februari 2021.

"Untuk menjadi Sekolah Penggerak, para kepala sekolah mengikuti tes. Alhamdulillah 32 Kepala Sekolah di Kota Tangerang lulus sebagai Sekolah Penggerak, yakni 6 jenjang TK, 13 jenjang SD, 13 jenjang SMP," katanya.

Lebih lanjut, Sachrudin mengatakan Dinas Pendidikan Kota Tangerang terus melakukan pemantauan, pendampingan dan mengevaluasi Sekolah Penggerak dalam melaksanakan tahapan-tahapan sesuai program dari Kemendikbudristek.

"Mudah-mudahan melalui kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, program ini bisa mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila," katanya. ● pp

## Kampus di Banten Segera Uji Coba Kuliah Tatap Muka

**SERANG (IM)** - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Banten akan mengizinkan kampus menggelar uji coba perkuliahan tatap muka terbatas pada awal semester ganjil, yakni 8 September 2021.

Ketentuan ini menyusul status Provinsi Banten yang telah memasuki zona kuning pandemi Covid-19 atau PPKM Level 3 seiring menurunnya angka kasus penularan.

"Atas pertimbangan tersebut, APTISI memberi lampu hijau seluruh kampus di Banten untuk menggelar uji coba perkuliahan tatap muka secara terbatas," kata Abas Sunarya, Ketua APTISI Provinsi Banten, Jumat (3/9).

Sejumlah skenario yang menjadi acuan telah disiapkan, di mana satu kelas hanya bo-

leh di isi maksimal 20 persen dari kapasitas baik teori maupun praktikum. Areal kampus juga dilengkapi dengan sarana prasarana protokol kesehatan Covid-19.

"Tapi hanya dosen dan mahasiswa yang sudah ter-vaksinasi Covid-19 minimal satu dosis yang diperbolehkan mengikuti uji coba," jelas Abas.

Meski demikian, APTISI Provinsi Banten mengimbau kepada pimpinan kampus untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sebelum melakukan uji coba kuliah tatap muka.

Wina, mahasiswa salah satu kampus di Tangerang menyambut baik uji coba kuliah tatap muka tersebut. "Karena sudah satu tahun kuliah secara daring, kurang efektif," ungkapnya. ● pp



**KEPADATAN KENDARAAN DI JALUR PUNCAK BOGOR**

Sejumlah kendaraan dengan tujuan jalur wisata Puncak terjebak kemacetan di Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/9). Kepadatan kendaraan tersebut terjadi imbas dari pemberlakuan sistem ganjil genap memasuki kawasan wisata Puncak Bogor.

## Ular Piton Pemakan Ternak Warga di Tangerang Akhirnya Ditangkap

**TANGERANG (IM)** - Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular piton sepanjang 3 meter usai memangsa ternak warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (3/9) siang.

Meski awalnya sempat kesulitan, ular piton berbobot 12 kilogram yang berada di pekarangan rumah warga selama dua hari terakhir ini akhirnya berhasil dievakuasi. Dengan menggunakan tongkat, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular piton sepanjang 3 meter itu.

Ular piton yang masuk ke dalam semak-semak di pekarangan rumah warga usai memangsa ternak ini membuat petugas pemadam kebakaran

kesulitan lantaran tidak terlihat. Tidak sampai disitu, ular piton dengan bobot 12 kilogram yang terlihat agresif ini pun terus menyerang petugas pemadam kebakaran saat akan dilumpuhkan.

Setelah sempat berjibaku selama 20 menit, ular piton yang masuk permukiman dan meresahkan warga selama dua hari terakhir ini akhirnya berhasil diamankan petugas.

Danpos Damkar Pasar Kemis, Boy Rahmat Firdaus mengatakan, setelah diamankan, ular piton ini rencananya akan dilepasliarkan kembali oleh petugas pemadam kebakaran ke areal persawahan yang jauh dari permukiman warga. ● pp



**LATIHAN ATLET GANTOLE BANTEN**

Atlet gantole Banten berlatih untuk berlaga di PON XX Papua di Gorda, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (3/9). Tim gantole Banten menyiapkan empat atlet dan meningkatkan intensitas latihan menjelang PON XX Papua.

## Pemkab Lebak Ajak Warga Konsumsi Pangan Pengganti Beras

**LEBAK (IM)** - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengajak masyarakat sehari-hari mengonsumsi pengganti beras yang bahan bakunya dari umbi-umbian dengan memiliki kandungan gizi yang tinggi.

"Kita berharap warga tidak hanya ketergantungan konsumsi sama beras saja," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, Abdul Rohim di Lebak, kemarin.

Masyarakat Kabupaten Lebak hingga kini masih mengonsumsi ketergantungan pada beras, sehingga perlu dilakukan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan dapat memanfaatkan umbi-umbian, seperti talas, singkong, ubi jalar, gandum, ganyong, jagung, sukun sebagai pengganti beras.

Potensi makanan umbi-umbian di daerah ini melimpah, namun masyarakat belum mampu mengelolah keragaman pangan. Kebanyakan warga setempat mengelola makanan umbi-umbian itu direbus atau digoreng sehingga tidak memiliki mutu dan kualitas rasa.

Padahal, kata dia, jika dikelola umbi-umbian diproduksi bolu, lapis, roti, keripik yang memiliki rasa enak, lezat juga banyak kand-

ungan gizi. Bahkan, makanan ganyong saja memiliki kadar protein yang cukup tinggi dibandingkan beras.

"Kami yakin warga bisa mengganti makanan pokok dari beras ke umbi-umbian," katanya menjelaskan.

Menurut dia, pemerintah daerah berdasarkan imbauan Bupati Lebak bahwa masyarakat jangan sampai menggunakan bahan makanan pokok pada beras saja. Sebab, produksi beras kedepan bisa menurun dengan maraknya berbagai pembangunan. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat agar mengurangi konsumsi makanan pokok beras.

Selain itu juga orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anaknya untuk makan makanan pokok yang lain selain nasi. Saat ini, kata dia, makanan pengganti beras sudah dilakukan di lingkungan aparat sipil negeri (ASN/PNS) setiap rapat.

Mereka para organisasi perangkat daerah (OPD) setempat jika menggelar rapat terdapat aneka menu makanan yang berbahan baku umbi-umbian. "Kami terus mengencangkan agar warga sehari-hari dapat mengganti makanan dari beras ke umbi-umbian," katanya. ● pra